

KOMPATIBILITAS KEUTAMAAN KARAKTER DENGAN NILAI-NILAI PANCASILA: PERSPEKTIF KONTRAK PSIKOLOGIS DAN KONTRAK SOSIAL

¹ Juneman, ² Fhardian Putra, ³ Eko Aditya Meinarno

¹ Jurusan Psikologi, Universitas Bina Nusantara, Jl. Kemanggisian Ilir III No. 45 Jakarta 11480

^{2,3} Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Kampus Baru UI Depok 16424

e-mail: ¹ juneman@binus.ac.id, ² fhardian89@gmail.com, ³ meinarno@ui.ac.id

Abstrak. Dalam artikel ini, peneliti berargumentasi bahwa kegagalan (bila ada) dari pendidikan nilai di Indonesia disebabkan karena gagal dipahaminya pendidikan karakter dan Pancasila masing-masing sebagai kontrak psikologis (informal, tidak tertulis) dan kontrak sosial. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan penyelidikan empiris terhadap hubungan antara kedua basis kontrak, yakni keutamaan karakter dan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan desain korelasional, dengan sampel 1000 mahasiswa sebuah Perguruan Tinggi Negeri di Jakarta (449 laki-laki, 551 perempuan; $M_{usia} = 17,79$ tahun; $SD_{usia} = 1,01$ tahun). Hasil penelitian menunjukkan adanya kompatibilitas berupa korelasi positif antar sejumlah dimensi Keutamaan/Kekuatan Karakter dan Keber-Pancasila-an yang diteliti. Sebagai penelitian awal yang bersifat indigenous, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam memandang pendidikan karakter.

Kata kunci: karakter, Pancasila, kontrak, nilai

1. Pendahuluan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan semakin memperkuat kurikulum pendidikan karakter mulai 2013 (Joewono, 2012). Penulis telah berperan serta dalam diskursus akademik mengenai pendidikan karakter, dengan memperlihatkan: (1) perdebatan filosofis dan akademis seputar pendidikan karakter, termasuk diferensiasi terminologis dan modelnya (Juneman, 2010), (2) bahwa pendidikan karakter merupakan salah satu gagasan tematis dalam mazhab psikologi positif (Juneman, 2009), (3) bahwa psikologi sosial dapat berkonvergensi dengan ilmu pendidikan untuk merajut proses pendidikan berkarakter dan berbudaya (Juneman, 2010), serta (4) bahwa tingkat identifikasi individu terhadap nilai-nilai Pancasila dapat diukur dengan sebuah skala psikologis (Meinarno & Juneman, 2012). Berbagai pendekatan teoretis dan pengukuran telah berupaya memberikan kontribusi pemahaman ontologis dan epistemologis karakter dan nilai (misalnya, Shimp, 2007; Shryack, Steger, Krueger, & Kallie, 2010).

Salah satu minat riset terpenting psikologi dalam hal pendidikan karakter adalah mengenai penjelmaan keutamaan karakter menjadi tindakan berkarakter, dan hal ini sering dianggap sebagai tolok ukur keberhasilan pendidikan karakter. Urgensi minat riset ini tidak hanya berangkat dari kegelisahan akademik, tetapi juga dari kebutuhan praktis, sebagaimana direpresentasikan dalam pernyataan Sarwono (2012) berikut ini:

"Tentu saja metode indoktrinasi model Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) pada era Soeharto sudah ketinggalan zaman. Namun, mengawal Pancasila dengan metode-metode yang lebih cerdas dan egalitarian harus diciptakan, dikembangkan, dan dipraktikkan"

Salah satu karya yang paling komprehensif dalam menjawab kegelisahan tersebut adalah karya Berkowitz dan Bier (2007). Kesimpulan kajian kepustakaan

mereka terhadap 109 penelitian yang antara lain diperoleh dari pangkalan data *ERIC*, *PsycINFO*, *HealthSTAR*, dan *Social Science Index* sebagai berikut (h. 29):

"Character education can work when implemented with fidelity and broadly, and has a very robust impact. Effective character education tends to include: professional development; student interactive pedagogical strategies; an explicit focus on character/ethics; direct training of social and emotional competencies; modeling of character; aligned classroom/behavior management strategies; and community service and/or service learning."

Hasil-hasil penelitian di Indonesia perihal pendidikan karakter dapat mengkonfirmasi temuan Berkowitz dan Bier tersebut, dan karenanya tidak dipaparkan ulang dalam tulisan ini. Tulisan ini justru akan mengangkat sebuah perspektif alternatif dalam bagaimana kita harus memandang pendidikan karakter, termasuk pendidikan Pancasila, yakni dengan menggunakan (1) konsep psikologi, yakni Kontrak Psikologis, dan (2) konsep sosiologi, yakni Kontrak Sosial. Penulis juga melakukan studi empiris untuk menguji kompatibilitas antara keutamaan karakter yang dikemukakan Peterson dan Seligman (2004) dan nilai-nilai Pancasila.

2. Kontrak Psikologis dan Kontrak Sosial

Kontrak psikologis merupakan sebuah konsep dalam lapangan psikologi industri dan organisasi (PIO). Kontrak psikologis didefinisikan sebagai keyakinan pekerja mengenai obligasi resiprokal (kewajiban timbal balik) antara pekerja dengan organisasinya, dalam hal mana obligasi tersebut didasarkan atas janji yang dipersepsikan oleh pekerja meskipun tidak selalu direkognisi/diketahui oleh agen-agen organisasi (rekruter, penyelia/supervisor, manajer HR, dsb) (Morrison & Robinson, 1997). Menurut sejarahnya, kontrak psikologis berasal dari konsep psikologi klinis, yakni "kontrak psikoterapi", yang dianggap sebagai aspek tak teraba (*intangibile*) dari relasi kontraktual antara psikoanalisis dengan pasien (Meckler, Drake, & Levinson, 2003; Schalk & Roe, 2007). Konsep ini diaplikasikan dalam dunia kerja, dan disinonimkan dengan "kontrak tidak tertulis" (*unwritten contract*), yaitu jumlah seluruh harapan mutualistis antara pekerja dan organisasi, termasuk hal-hal apa yang seyogianya diberikan dan diterima oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini, pihak manajemen "berjanji" untuk menempatkan pekerja dalam situasi motivasional di mana kebutuhan pekerja akan afeksi, agresi, dependensi, dan pencapaian tujuan-tujuan ego dapat dipenuhi secara memadai. Sebagai ganti (pertukaran) dari kesempatan pemenuhan kebutuhan yang diberikan organisasi tersebut, pekerja berjanji untuk seterusnya mengeluarkan upaya untuk bekerja secara produktif yang menguntungkan organisasi.

Ada dua penyebab dasar terjadinya pelanggaran kontrak psikologis, yakni pengingkaran (*reneging*) dan inkongruensi (Turnley & Feldman, 1999). Pengingkaran terjadi bilamana organisasi secara sengaja melanggar janji kepada pekerja, baik karena tujuan tertentu ataupun karena situasi-situasi tak terduga. Sebaliknya, inkongruensi terjadi bilamana pekerja dan organisasi memiliki pemahaman yang berbeda berkenaan dengan hal yang dijanjikan kepada pekerja. Dalam hal ini, organisasi merasa telah memenuhi komitmennya kepada pekerja, namun pekerja mempersepsikan bahwa organisasi telah gagal menjaga atau memenuhi janjinya.

Dalam perkembangannya, nuansa psikologi klinis diperluas dengan perspektif psikologi sosial dan kognitif (Rousseau, 2003). Metafora untuk mutualisme dalam kontrak psikologis adalah "*meeting of the minds*", yakni momen perjumpaan ketika

pikiran-pikiran para pihak berkonvergensi menjadi satu. Hal ini nampak nyata dalam konseling pernikahan, dalam mana kontrak merupakan sarana pemulihan komunikasi dan kepercayaan antar pasangan dalam hubungan yang sedang bermasalah. Dalam hal ini, kontrak merupakan sebuah proses, bukan sebuah dokumen, yang berfokus pada mekanisme-mekanisme kognitif dan sosial di balik perjanjian dan bangunan relasi suami-istri. Dalam perspektif relasional, fokus dari resiprositas dan obligasi antara pekerja dengan organisasi justru bukan individu ("I") sebagaimana dalam tradisi psikologi klinis Sigmund Freud; melainkan fokusnya adalah "kita" ("we"). Dalam hal ini, sifat hubungan pekerja dengan organisasi bukanlah dependensi (pekerja bergantung pada organisasi, dan organisasi membuat pekerja bergantung padanya), melainkan otentik, konektif, dan terbuka. Artinya adalah bahwa para pekerja walaupun mengalami kerentanan (*vulnerable*), namun berkemauan untuk mengambil risiko yang dapat melayani kepentingan pihak lain maupun diri mereka sendiri. Dengan demikian, metafora relasional dalam kontrak psikologis bukanlah antara orangtua dengan anak, melainkan antara dua orang dewasa, yang mensyaratkan para pihak berbagi kekuasaannya dalam derajat tertentu untuk mencapai kesepakatan.

Ada tiga pola respons pekerja terhadap perubahan tingkah laku pekerja sehubungan dengan kewajiban mutual yang tercakup dalam kontrak psikologis, yakni (1) penyeimbangan, (2) revisi, dan (3) desersi (Schalk & Roe, 2007). Dalam kasus kesenjangan minor antara persepsi dan ekspektasi/harapan, pekerja dapat mengambil tindakan korektif tanpa mengubah kontrak psikologis. Dalam situasi-situasi di mana tingkah laku masih dapat ditoleransi, kontrak psikologis relatif stabil, maka para pihak bertingkah laku secara mekanistik dan otomatis mengikuti kontrak psikologis. Apabila terjadi perubahan tingkah laku dari salah satu pihak yang tidak dapat ditoleransi, atau melampaui batas penerimaan, maka dapat terjadi revisi kontrak psikologis. Dengan perkataan lain, informasi yang diperoleh pekerja berdasarkan pengamatan tingkah laku organisasi dan tingkah lakunya sendiri dapat mengubah gagasan mengenai resiprositas kontrak. Desersi terjadi ketika deviasi (penyimpangan) terhadap kontrak psikologis tidak dapat dinegosiasikan, atau terjadi penyimpangan ekstrim. Pekerja kehilangan komitmen dan tidak lagi merasa memiliki kewajiban untuk menjaga janji yang termaktub dalam kontrak psikologis.

Tabel 1
Perbandingan antara Kontrak Sosial dan Kontrak Psikologis

Kontrak Sosial	Kontrak Psikologis
Kontrak sebagai model politis	Kontrak sebagai model mental
Hilangnya kebebasan natural dalam rangka mencapai kebebasan sipil	Ekspresi kebebasan individual
Kondisi sipil (<i>civil state</i>)	Citra/harga diri, citra yang terbentuk melalui (a) janji (<i>promising act</i>), (b) tekanan sosial, dan (d) reputasi
Kesetaraan (ekualitas) antar subjek	Mutualisme dengan interaksi dan generalisasi dalam ekologi kontrak
Bentuk umum komunikasi	Bentuk umum dialog antara agen-subjek dan agen "yang berbicara atas nama organisasi"
Tanpa batasan waktu (<i>timeless</i>)	Memiliki basis waktu (<i>time based, over time</i>)
Janji antara publik dan individu	Memiliki dimensi transaksional (ekonomis) dan relasional (pertukaran)
Sebuah bentuk alienasi politis	Kontrol diri dan kontrol terhadap orang lain

Menurut Pesqueux (2012), kontrak sosial merupakan dimensi politis dari kontrak, yang berdasarkan atas dua konsep. Pertama adalah *pactum societatis*. Individu-individu membiarkan keadaan alamiah (*state of nature*) membentuk diri mereka menjadi sebuah masyarakat berdaulat (*sovereign society*) dengan menukar hak-hak natural dengan hak-hak sipil. Kedua adalah *pactum subjectionis*, yakni sebuah kontrak pemerintah antara seorang pemimpin yang memiliki kedaulatan/kekuasaan dengan seorang individu yang memiliki hak-hak. Perbandingan antara kontrak sosial dengan kontrak psikologis antara lain dapat dilihat pada Tabel 1 (Pesqueux, 2012). Lebih jelasnya, pembaca dalam merujuk pada Teori Perjanjian Negara (Magnis-Suseno, 1994).

3. Kontrak Dalam Pendidikan Karakter dan Pancasila

Penelitian ini menganalogikan pendidikan karakter dengan kontrak psikologis, dan khususnya kontrak psikologis-relasional. Analogi ini didukung oleh kenyataan di lapangan. Ambil contoh (Keppy, 2012):

“Wakil Rektor I Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Prof. Dr. Ing. Herman Sasongko, mengatakan bahwa mahasiswa baru yang masuk ke ITS ibarat sudah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menjadi manusia yang mulia. ‘Di ITS ini para mahasiswa diibaratkan sudah *teken* kontrak untuk menjadi manusia yang mulia,’ ucap Prof. Dr. Ing. Herman Sasongko”

Dengan menggunakan penjelasan fungsional, penelitian ini berargumen bahwa bila ada kegagalan pendidikan karakter di Indonesia selama ini, maka hal tersebut disebabkan terjadinya pelanggaran, pengkhianatan (*betrayal*) terhadap kontrak psikologis yang tidak tertulis itu. Masalahnya adalah bahwa pelanggaran kontrak psikologis dalam pendidikan moral atau karakter seringkali terjadi bahkan sebelum pendidikan itu dimulai; yang artinya syarat-syarat sebuah kontrak pun belum terpenuhi. Franz Magnis-Suseno (1999, h. 139) mengemukakan salah satu hal yang krusial:

“Memberikan pembinaan moral memuat pengandaian bahwa yang memberikannya secara moral lebih unggul daripada yang menerimanya.”

Kontrak psikologis juga bukan merupakan sesuatu yang dapat dipaksakan, karena bersifat perseptual dan informal. Menurut tinjauan teoretis kontrak psikologis-relasional, apabila terjadi pelanggaran, pengingkaran kontrak oleh orang lain (misalnya, dalam hal ini: penatar, guru, pejabat melakukan tindakan imoral), maka individu akan merasa bebas melakukan revisi bahkan desersi terhadap kontrak. Desersi inilah yang nampak dalam gejala seperti pembulian, tawuran, pelecehan seksual dan pemerkosaan, pembunuhan, dan sebagainya, di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Di pihak lain, Pancasila juga merupakan sebuah kontrak, yakni kontrak sosial, sebuah persetujuan atau kompromi antara sesama warga negara tentang asas-asas negara Indonesia (Onghokham, 2001). Bila prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila itu dilanggar, maka pada hakikatnya terjadi pembubaran negara Indonesia. Lebih rinci, Onghokham menyatakan:

"Dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi, maka dengan sendirinya Pancasila mendapatkan saingan dengan gagasan-gagasan lain di masyarakat majemuk seperti Indonesia yang sudah tentu memiliki berbagai macam ideologi masing-masing. Ini adalah jeratan yang menjerumuskan rezim Orde Baru, yang mengubah kontrak sosial menjadi ideologi negara. Ini

menjadikan Pancasila harus bersaing dengan ideologi-ideologi lain dalam masyarakat. Akan berbeda persoalannya bila rezim itu sadar sejarah dan tetap menjadikan Pancasila sebagai suatu kontrak sosial. Sebagai kontrak sosial, Pancasila layak berdiri di atas berbagai ideologi karena ia merupakan suatu kontrak pembentukan negara. Apabila memang ingin diubah, berarti negaranya harus dibubarkan lebih dulu."

Masalahnya adalah bahwa pelanggaran kontrak sosial dalam Pancasila juga sering terjadi. Franz Magnis-Suseno (1995, h. 112) mengemukakan tendensi ini:

"Yang sangat menarik ialah bahwa Pancasila termuat dalam semua undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konsensus dasar sebenarnya cukup kokoh didukung oleh masyarakat. Tetapi tetap saja ada pihak-pihak yang ingin menggeser kompromi nasional ke arah tujuan-tujuan khusus mereka sendiri Dalam masyarakat kita terdapat banyak tendensi sentrifugal yang mempunyai potensial destruktif."

4. Metode

4.1 Partisipan dan Desain

Partisipan penelitian ini adalah 1000 mahasiswa baru (angkatan 2012) sebuah Perguruan Tinggi Negeri di Jakarta (449 laki-laki, 551 perempuan; $M_{usia} = 17,79$ tahun; $SD_{usia} = 1,01$ tahun) yang diambil acak. Desain penelitian ini adalah desain korelasional.

4.2 Instrumen

Penelitian ini menggunakan dua buah skala psikologis. Pertama, salah satu dari penulis (Fhardian Putra) mengkonstruksi skala keutamaan/kekuatan karakter berdasarkan teori Peterson dan Seligman (2004). Kekuatan dan keutamaan karakter memungkinkan orang memilih untuk menampilkan tingkah laku tertentu dan menjaga diri agar tetap berada dalam keadaan yang baik; juga berfungsi mengelola emosi seseorang agar tetap positif dan tak terganggu secara signifikan oleh emosi-emosi negatif (Diponegoro, Singgih-Salim, Dewi, Poerbasari, & Nefi, 2011). Enam keutamaan karakter dan contoh butirnya nampak dalam Tabel 2. Uji reliabilitas dan validitas terhadap 300 mahasiswa (132 laki-laki, 168 perempuan; $M_{usia} = 17,79$ tahun; $SD_{usia} = 0,93$ tahun) yang dijaring datanya secara acak menunjukkan bahwa indeks *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,6 dan *corrected item total correlations* untuk seluruh butir dengan dimensinya lebih besar dari 0,3. Alat ukur kedua, skala keber-Pancasila-an yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya berdasarkan penelitian Meinarno dan Juneman (2012) serta Suwartono dan Meinarno (2010). Berdasar uji validitas konkuren, dimensi Sila Ketiga belum valid, sehingga tidak diikutsertakan dalam pengukuran. Alat ukur ini dan contoh butirnya nampak dalam Tabel 3. Seluruh instrumen memiliki pilihan respons dari *Sangat Tidak Sesuai* (1) sampai dengan *Sangat Sesuai* (6).

Tabel 2
Instrumen Keutamaan dan Kekuatan Karakter

Keutamaan Karakter	Contoh Butir Kekuatan Karakter
Kebijaksanaan dan pengetahuan (<i>wisdom and knowledge</i>)	<i>Butir-butir skala yang dirancang oleh peneliti tidak valid dan tidak reliabel.</i>
Keberanian (<i>courage</i>) ($n = 3$; $\alpha = 0,68$) (Seluruhnya)	<ul style="list-style-type: none"> Berpegang teguh pada prinsip diri merupakan hal yang sulit dilakukan.

<i>unfavorable items</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Saya akan berhenti memecahkan suatu masalah ketika menemui kegagalan pada percobaan pertama. • Lebih baik menjadi populer daripada menjadi diri saya sendiri.
Kemanusiaan (<i>humanity</i>)	<i>Butir-butir skala yang dirancang tidak valid dan tidak reliabel.</i>
Keadilan (<i>justice</i>) ($n = 2$; $\alpha = 0,60$)	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan hal yang penting bagi saya untuk memperbaiki ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. • Pada saat keadaan darurat, saya merupakan orang pertama yang memberikan instruksi penyelamatan kepada orang di sekitar.
Kendali diri (<i>temperance</i>) ($n = 4$; $\alpha = 0,66$) (Seluruhnya <i>unfavorable items</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Sulit rasanya untuk kembali kepada kondisi normal setelah seseorang menyakiti saya. • Kesuksesan kerja kelompok yang pernah saya raih terjadi hanya karena hasil kerja keras saya. • Tujuan jangka panjang merupakan hal yang membosankan, lebih baik mencapai tujuan jangka pendek.
Transendensi (<i>transcendence</i>) ($n = 5$; $\alpha = 0,64$)	<ul style="list-style-type: none"> • Saya tidak akan sampai pada kondisi saat ini jika tidak ada bantuan dari orang-orang di sekitar saya. • Saya terbuka untuk menceritakan beberapa cerita lucu kepada orang lain. • Saya dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan saya.

Tabel 3
Instrumen Keber-Pancasila-an

Keber-Pancasila-an	Contoh Butir
Ketuhanan Yang Maha Esa ($n = 5$; $\alpha = 0,78$)	<ul style="list-style-type: none"> • Beragama merupakan wujud kepercayaan saya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. • Saya berusaha menghormati pemeluk agama lain dalam situasi atau kondisi apapun. • Saya tidak menghalangi ketika ada penganut agama lain yang ingin menjalankan ibadah.
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab ($n = 4$; $\alpha = 0,70$)	<ul style="list-style-type: none"> • Saya yakin bahwa pada dasarnya derajat setiap manusia adalah sama, tidak peduli suku, agama, ras, ataupun golongannya. • Saya percaya bahwa umat manusia harus saling mencintai.
Persatuan Indonesia	<i>Butir-butir skala yang dirancang oleh peneliti tidak valid.</i>
Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan ($n = 5$; $\alpha = 0,70$)	<ul style="list-style-type: none"> • Selama masih bisa dilakukan, saya mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. • Seluruh Warga Negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia ($n = 6$; $\alpha = 0,77$)	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum meminta hak, saya berusaha menjalankan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya. • Aktivitas sehari-hari saya dilakukan untuk menyejahterakan masyarakat.

5. Hasil dan Diskusi

5.1 Deskripsi Partisipan

Ragam agama partisipan adalah Islam (84%), Kristen Protestan (9,6%), Kristen Katolik (5,1%), Hindu (0,9%), dan Buddha (0,4%). Mayoritas partisipan beretnis Jawa (39,7%), Sunda (13,2%), dan Batak (8,3%).

5.2 Uji Korelasi

Hasil uji korelasi *Pearson* antara keutamaan karakter dengan keber-Pancasila-an dengan menggunakan program *SPSS 19 for Windows* disajikan dalam Tabel 4.

Sebagaimana nampak dalam tabel, hasil yang menonjol adalah korelasi positif antara Sila Pertama dengan Transendensi ($r = 0,236$); Sila Kedua dengan Keadilan ($r = 0,228$); Sila Keempat dengan Keadilan ($r = 0,276$) dan Transendensi ($r = 0,265$); serta Sila Kelima dengan Keadilan ($r = 0,521$). Taraf korelasinya adalah lemah hingga moderat.

Tabel 4
Hasil Uji Korelasi ($n = 1000$)

	Keberanian	Keadilan	Kendali Diri	Transendensi
Keber-Pancasila-an Sila Pertama	-0,114**	0,188**	-0,147**	0,236**
Keber-Pancasila-an Sila Kedua	-0,124**	0,228**	-0,137**	0,209**
Keber-Pancasila-an Sila Keempat	-0,061	0,276**	-0,126**	0,265**
Keber-Pancasila-an Sila Kelima	-0,091**	0,521**	-0,164**	0,156**

Keterangan: ** $p < 0,01$

Ditemukannya korelasi positif antara Transendensi dengan Keber-Pancasila-an Sila Kesatu tidaklah mengejutkan karena Transendensi merupakan kekuatan yang menempa hubungan individu dengan semesta yang lebih luas serta menyediakan makna. Dalam transendensi terdapat apresiasi terhadap keindahan dan keunggulan, rasa syukur (*gratitude*), harapan, humor, dan religiusitas; hal-hal yang merupakan nilai-nilai Sila Kesatu (Ke-Tuhan-an). Korelasi antara Keadilan dengan identifikasi (Keber-Pancasila-an) Sila Kelima dan Sila Kedua juga dapat dipahami. Secara semantik dan substantif, Sila Kelima membicarakan keadilan, demikian pula Sila Kedua memuat kata tentang keadilan: "Kemanusiaan yang *adil* dan beradab". Namun, korelasi dengan Sila Kelima lebih kuat. Korelasi Keber-Pancasila-an Sila Keempat dengan Transendensi dapat kita pahami, bahwa demokrasi Pancasila juga memiliki semangat ke-Tuhan-an: "Tidakkah agama Islam mengatakan bahwa kepala-kepala negara, baik *kalif*, maupun *Amirul mu'minin*, harus dipilih oleh Rakyat?" (Soekarno, 1945). Korelasi Sila Keempat dengan Keadilan dapat kita jelaskan dengan pidato Soekarno (1945) tentang Sila Keempat:

Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni *politiek-ecomische democratie* yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial! Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang hal ini. Apakah yang dimaksud dengan Ratu Adil? Yang dimaksud dengan faham Ratu Adil, ialah *sociale rechtvaardigheid*. Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia-baru yang di dalamnya ada keadilan di bawah pimpinan Ratu Adil.

6. Kesimpulan dan Saran

Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa keutamaan karakter sebagai *basis kontrak* psikologis dan nilai-nilai Pancasila sebagai *basis kontrak* sosial memiliki kompatibilitas, meskipun yang pertama berasal dari konsep Barat dan yang kedua digali dari bumi Indonesia sendiri. Yang berperan di sini adalah operasionalisasi.

Adanya kompatibilitas berupa korelasi mengimplikasikan, pertama, tiadanya kontradiksi dalam basis kontrak, sehingga kontrak psikologis dan kontrak sosial dapat saling menunjang. Kedua, jika terjadinya tumpang tindih, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan untuk menyatukan mata pelajaran atau mata kuliah dan/atau bobot kreditnya agar efisien dari segi waktu dan biaya. Saran metodologis: (1) antisipasi

social desirability dari pengukuran, (2) konstruk alat ukur baru untuk keber-Pancasila-an Sila Ketiga, dan keutamaan karakter Kemanusiaan, Kebijakanaksanaan dan Pengetahuan.

7. Daftar Pustaka

- Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2007). "What works in character education". *Journal of Research in Character Education*, 5(1), 29-48.
- Joewono, B. N. (2012, 2 Oktober). *Perubahan kurikulum pendidikan nasional mulai 2013* (Online), (<http://edukasi.kompas.com/read/2012/10/02/16375820/Perubahan.Kurikulum.Pendidikan.Nasional.Mulai.2013>, diakses 10 Oktober 2012).
- Juneman. (2009). "Aplikasi psikologi positif dalam dunia bisnis (Suatu kajian pustaka)". *Humanitas*, 6(2), 130-143.
- Juneman. (2010, November). "Lembaga Pendidikan Tinggi Tenaga Kependidikan (LPTK) dalam tantangan: Konvergensi ilmu pendidikan dengan psikologi sosial serta hikmah pembelajaran lintas budaya dalam merajut proses pendidikan berkarakter dan berbudaya". *Proceeding of The 4th International Conference on Teacher Education, Jointly Organised By Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Indonesia and Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia*.
- Magnis-Suseno, F. (1994). *Etika politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- , F. (1999). *Berfilsafat dari konteks*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Meckler, M., Drake, B. H., & Levinson, H. (2003). "Putting psychology back into psychological contracts". *Journal of Management Inquiry*, 12(3), 217-228.
- Meinarno, E. A., & Juneman. (2012). "Validasi konkuren skala keber-Pancasila-an pada remaja mahasiswa di Jakarta". *Insan Media Psikologi*, 14(1), 1-13.
- Morrison, E. W., & Robinson, S. L. (1997). "When employees feel betrayed: A model of how psychological contract violation develops". *Academy of Management Review*, 22(1), 226-256.
- Onghokham. (2001, 6 Desember). *Pancasila sebagai kontrak sosial*. Kompas (Online), (<http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F3683/Pancasila%20sebagai%20Kontrak%20Sosial.htm>, diakses 10 Oktober 2012).
- Pesqueux, Y. (2012). "Social contract and psychological contract: A comparison". *Society and Business Review*, 7(1), 14-33.
- Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). *Character strength and virtues: A handbook and classification*. Oxford: Oxford University Press.
- Rousseau, D. M. (2003). "Extending the psychology of the psychological contract: A reply to 'Putting psychology back into psychological contracts'". *Journal of Management Inquiry*, 12(3), 229-238.
- Sarwono, S. W. (2012, 12 Oktober). *Psikologi keamanan nasional*. Kompas, h. 6.
- Schalk, R., & Roe, R. E. (2007). "Towards a dynamic model of the psychological contract". *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 37(2), 167-182.
- Shimp, C. P. (2007). "Quantitative behavior analysis and human values". *Behavioural Processes*, 75, 146-155.
- Shryack, J., Steger, M. F., Krueger, R. F., & Kallie, C. S. (2010). "The structure of virtue: An empirical investigation of the dimensionality of the virtues in action inventory of strengths". *Personality and Individual Differences*, 48, 714-719.
- Soekarno. (1945). *Lahirnya Pancasila* (Online), (http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/uploaded_files/pdf/speech/normal/soekarno10.pdf, diakses 10 Oktober 2012)
- Suwartono, C., & Meinarno, E. A. (2010, Juli). "Construct validation of Pancasila scale: An empirical report". *Proceeding of The International Conference of Revisited Asian Society*. Universitas Santa Dharma, Yogyakarta.
- Turnley, W. H., & Feldman, D. C. (1999). "The impact of psychological contract violations on exit, voice, loyalty, and neglect". *Human Relations*, 52(7), 895-922.